



Ratusan Warga Disanksi Nyapu Jalan

JOGJA—Pemda DIY mulai memberlakukan sanksi sosial kepada pelanggar protokol kesehatan baik perorangan maupun pemilik atau pengelola tempat publik.

Para pelanggar kebanyakan membawa masker, tetapi tidak dipakai.

Selain operasi pada perorangan, Satpol PP DIY juga telah melakukan operasi protokol kesehatan yang menasar tempat usaha.

Hal ini turut diberikan sanksi karena pada operasi masker terdapat tiga kategori pelanggaran protokol kesehatan masker, yakni tidak membawa masker sama sekali, membawa masker tapi dikantongi dan memakai masker tapi tidak dengan benar.

Adapun sanksi yang diberikan yakni menyapu jalan selama 15 menit. Selain itu, para pelanggar juga didata KTP-nya dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran. Dari pendataan itu, tercatat pelanggaran didominasi oleh warga DIY sendiri, meski ada juga wisatawan luar daerah bahkan ada yang dari Jepang.

Selain operasi pada perorangan, Satpol PP DIY juga telah melakukan operasi protokol kesehatan yang menasar tempat usaha. "Di wilayah Prawirotaman ada 10 kafe yang kami beri peringatan karena pengunjungnya tidak memakai masker dan jarak kursi berdekatan. Nanti kami lihat 1X24 jam kalau masih belum patuh akan ditutup sementara," ungkapnya.

Operasi masker, kata dia, akan dilakukan setiap hari dengan waktu dan lokasi yang tidak sama. Khusus untuk Sabtu dan Minggu, operasi masker difokuskan di Malioboro. Di tempat wisata lain juga akan dilakukan hal yang sama, hanya mungkin sanksinya berbeda.

Ia mencontohkan jika di pantai, sanksinya yakni memungut sampah dengan kantong plastik yang telah disediakan. Dari operasi masker tersebut, ia melihat pelanggaran kebanyakan masih berusia muda atau mahasiswa. Ia mengimbau kampus untuk memastikan mahasiswanya menerapkan protokol kesehatan di mana pun berada, mengingat perkuliahan tatap muka kemungkinan segera dimulai.

► Halaman 10

WASPADA CORONA

Dalam operasi yang digelar pada Selasa (8/9) malam, terjaring setidaknya 176 pelanggar. Para pelanggar langsung mendapatkan sanksi sosial berupa menyapu jalan.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, menjelaskan operasi masker dilakukan di dua titik yakni Tugu Jogja dan Titik Nol Kilometer, pada pukul 20.00 WIB-23.00 WIB. "Hasilnya dari dua titik itu ada 176 orang pelanggar, sanksinya kami suruh menyapu jalan," ujarnya, Rabu (9/9).

Para pelanggar kata dia, kebanyakan membawa masker, tetapi tidak dipakai.

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi

☐ Untuk Diketahui

☐ Jumpa Pers

Kepala

Tid

ono, S.Sos, MM

0723 199603 1 005

Pelanggar protokol Covid-19 dihukum masuk ke replika peti mati.

Ratusan Warga...

Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan saat dilakukan operasi masker ternyata masih banyak pelanggaran protokol kesehatan. "Saya minta seluruh masyarakat mari kita bersama berpartisipasi tegakan protokol. Justru harusnya mereka tidak perlu dielektre [ditingkatkan] tapi bisa saling mengingatkan satu sama lain," ujarnya.

Operasi, kata dia, akan diteruskan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan tinggi, seperti tempat wisata, mal, pasar, tempat nongkrong dan lainnya. "Tempat nongkrong seperti di Tini Nof Km yang tempat duduk ditempati tiga orang, padahal sudah diberi tanda tidak boleh diduduki," katanya.

Langkah tegas yang diterapkan Pemda DIY karena penambahan pasien positif Covid-19 masih tinggi.

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 50 penambahan kasus positif pada Rabu. Sleman mendominasi penambahan ini sebanyak 27 kasus, sementara kesembuhan kasus juga cukup banyak, yakni 52 kasus.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, mengatakan penambahan meliputi kasus 1.601 hingga kasus 1.650. "Penambahan ini berdasarkan pemeriksaan pada 504 sampel dari 449 orang," ujarnya.

Kasus 1.648 dilaporkan meninggal dengan penyakit komorbid TB, Paru OAT dan Cholelitis. Sementara 52 kasus sembuh berdasarkan domisilinya meliputi Sleman 34 kasus, dan Kota Jogja 18 kasus. Dengan penambahan ini, total kasus positif DIY menjadi sebanyak 1.645 kasus, dengan 1.268 kasus sembuh dan 48 kasus meninggal.

Terkait dengan munculnya kasus positif di lingkungan perkantoran di Kota Jogja, Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY telah melakukan screening untuk semua lingkungan perkantoran pemerintahan. "Terutama perkantoran yang ada layanan publiknya didahulukan," katanya.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) kata dia, juga akan dites *rapid*. Meski lebih efektif jika langsung *swab*, menurutnya jumlah pegawai baik ASN maupun non ASN cukup banyak sehingga terkendala SDM dan kapasitas

Objek Wisata

Sementara itu, Dinas Pariwisata Bantul akan mengevaluasi penerapan protokol kesehatan di semua objek wisata dan usaha jasa pariwisata (UJP) di Bantul. Hal ini merupakan respons adanya kasus pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro Jogja yang positif Covid-19.

Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Kwintarto Heru Prabowo mengatakan secara prinsip sejak awal sudah menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan di objek wisata. Permintaan Pemda DIY agar adanya pendataan wisatawan untuk memudahkan penelusuran jika terjadi penularan Covid-19 juga sudah dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian, meski belum semua objek wisata.

Saat ini sudah ada 27 destinasi dan UJP yang sudah resmi buka dengan izin ke Dinas Pariwisata dan sudah memenuhi protokol kesehatan. "Kami evaluasi terus. Kami juga selalu ingatkan kepada pelaku wisata untuk selalu melakukan evaluasi," kata Kwintarto.

Evaluasi Total

Sebagai contoh, kata Kwintarto, pada Sabtu malam pekan depan Dinas Pariwisata bersama kepolisian dan TNI serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam Posko Pengamanan Parangtritis akan melakukan evaluasi total. Dalam evaluasi yang dibalut dengan sarasehan tersebut tidak hanya menekankan soal penerapan protokol kesehatan bagi pelaku wisata dan wisatawan, tetapi juga soal keamanan dan pelayanan wisatawan.

Kwintarto mengatakan evaluasi penting dilakukan karena kasus Covid di Bantul masih tinggi. Dinas Pariwisata tidak memungkiri masih ada beberapa objek wisata yang sudah melanggar penerapan protokol kesehatannya, misalnya terjadi penumpukan wisata tanpa adanya jarak atau soal pengenalan masker.

Dinas Pariwisata dengan keterbatasan personel, kata Kwintarto, tidak mungkin untuk memantau setiap saat di semua objek wisata. Namun Kwintarto tidak menyebutkan objek wisata yang melanggar tersebut. "Kami evaluasi terus. Kami masih pada tahap pembinaan, belum sampai keputusan untuk penutupan [objek wisata yang melanggar protokol kesehatan]. Lebih ke pembinaan, komunikasi,

pengarahan mengingatkan, konsisten kita lakukan," kata Kwintarto.

Pil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman Arip Pramana mengatakan untuk pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan masing-masing destinasi wisata di Sleman sudah membentuk Satgas Covid-19. Menurutnya, kinerja para Satgas ini sudah dinilai baik dan bekerja sesuai kewenangannya. Baik di Kaliurang hingga Tebing Breksi. "Masing-masing pelaku wisata juga bertanggungjawab jika terjadi sesuatu apalagi sampai nanti ditutup," katanya.

Protokol Kesehatan

Ia menambahkan berdasarkan pantauan di lapangan di sejumlah destinasi wisata hampir seluruh wisatawan yang datang juga mematuhi protokol kesehatan.

Meskipun begitu, katanya dia berharap agar pelaku wisata tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi kluster-kluster wisata di Sleman. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sleman Sudarningsih. Dijelaskan dia, sebelum diizinkan beroperasi Dispar mengecek seluruh persiapan baik sarana maupun prasarana hingga sumberdaya pelaku wisata. Jika semuanya dinilai memenuhi persyaratan, Dispar atau Satgas Covid-19 pun memberikan rekomendasi.

"Semua destinasi wisata menyiapkan dan menjalankan protokol kesehatan sesuai SOP. Dan kami terus melakukan evaluasi penerapannya. Jadi ini semua tergantung kesiapan destinasi wisata untuk beroperasi. Kalau siap, kami verifikasi," katanya.

Saat ini, kata Ningsih, juga ada perubahan minat wisatawan dari konsep *mass tourism* menjadi *family tourism*. Salah satunya yang terjadi di desa-desa wisata. "Untuk desa wisata memang sampai saat ini mulai beroperasi dengan konsep *family tourism* bukan lagi *mass tourism*. *Outbound* atau kegiatan yang mengundang massa juga ditiadakan, tetapi menerima rombongan kecil dan keluarga," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005